

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan otonomi daerah yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, memberi penegasan bahwa Otonomi Daerah harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pengaturan lebih lanjut atas penyusunan Laporan Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara detail atas pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah. Berpijak pada hal tersebut, maka penyusunan laporan keuangan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tersebut.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2019;
- b. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kota Surakarta;
- d. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019, dan;
- e. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019 mencakup semua aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh OPD (Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan). Laporan Keuangan ini terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja. Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA OPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca OPD.

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2019.

4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

b. Kebijakan Aset, Belanja Modal dan Harga Perolehan

Pada Tahun Anggaran 2019, pengakuan aset di Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan harga perolehan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju AkruaI Lampiran II.08 paragraf 29 yang mengungkap mengenai harga perolehan Aset 7 Tetap terdiri dari seluruh biaya yang terkait hingga aset tetap tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dimaksudkan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHITISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN

A.1 Laporan Realisasi Anggaran

- 1. Pendapatan LRA
- 2. Belanja LRA

A.2 Laporan Operasional (LO)

- 1. Pendapatan – LO
- 2. Beban – LO
- 3. Kegiatan non Operasional – LO
- 4. Pos Luar Biasa

A.3 Laporan Perubahan Ekuitas

- 1. Perubahan Ekuitas.

A.4 Neraca

- 1. Aset
- 2. Kewajiban
- 3. Ekuitas.

B. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. EKONOMI MAKRO

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dituntut berperan untuk secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan kemampuan yang ada baik sarana maupun prasarana yang tersedia maupun sumber daya manusianya.

Berbagai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah membuat rencana kinerja Tahun 2019 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sangat diperhatikan, pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan dan mendesaknya kebutuhan organisasi secara situasional.

Adapun Program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta selama Tahun 2019

Program :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan:

No	Program Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.850.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.400.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	89.530.000
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.837.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.284.958.470
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	112.666.250
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.850.000

11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.950.000
12	Penyediaan makanan dan minuman	36.200.790
13	Rapat-rapat koordinasi dan Kunsultasi ke Luar daerah	160.000.000
14	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	1.572.568.000

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

No	Program Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Pengadaan mebeleur	44.831.250
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	107.442.250
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	176.500.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.500.000

3. Program penataan administrasi kependudukan

Kegiatan:

No	Program Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	444.160.800
2	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating & pemeliharaan)	1.696.143.600
3	Koord. pelaksanaan kebijakan kependudukan	58.000.000
4	Penyid. informasi yang dapat di akses masy.	71.600.000
5	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	757.229.000
6	Pengembangan data base kependudukan	25.650.000
7	Sosialisasi kebijakan kependudukan	117.805.960
8	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	206.305.000
9	Penyusunan Kebijakan Kependudukan (DAK)	1.353.785.000

4. Program perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan:

No	Program Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	13.050.000
2	Penetapan RKPD	5.500.000
3	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	40.850.000

1. KEBIJAKAN KEUANGAN

Arah kebijakan anggaran pendapatan pada tahun 2019 secara umum sebagaimana tertuang dalam KUA PPAS Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019 meliputi:

1. Kebijakan untuk melanjutkan inovasi di bidang administrasi kependudukan program “ BESUK KIAMAT” yaitu Pelayanan untuk warga masyarakat untuk warga yang meninggal dunia akan diterbitkan akta kematian dalam waktu 1 x 24 Jam.
2. Kebijakan untuk melaksanakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik.
3. Kebijakan untuk melaksanakan inovasi baru “SAPU KUWAT” yaitu Satu Paket Urus Kependudukan Warga Terpenuhi.
4. Kebijakan untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “Pelayanan Prima” untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik terhadap warga masyarakat.
5. Kebijakan untuk memulai kegiatan inovasi baru “BENING KEKASIH KU” yaitu Berkah Nikah Ngganti KK, KTP, Sesuai Impian dan Harapan Ku.

2. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana disajikan tabel berikut ini :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
PENDAPATAN	0	0	0	0
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0	532.540.000
Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	532.540.000
BELANJA	13.924.458.108	13.461.438.029	96,35	13.686.417.296
BELANJA OPERASI	12.928.170.858	12.479.039.629	96,53	12.693.413.540
Belanja Pegawai	5.441.294.738	5.193.501.868	95,45	4.716.759.872
Belanja Barang dan Jasa	7.486.876.120	7.285.537.761	97,31	7.976.653.668
BELANJA MODAL	996.287.250	937.398.400	94,09	993.003.756
Belanja Tanah	0	00	0	00
Belanja Peralatan dan Mesin	996.287.250	937.398.400	94,09	993.003.756
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
SURPLUS / (DEFISIT)	(13.924.458.108)	(13.416.438.029)	96,35	(13.686.417.296)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.924.458.108)	(13.416.438.029)	96,35	(13.686.417.296)

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan Akuntansi berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 59).

3.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

(Isikan data ringkasan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah).

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

A.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.PENDAPATAN	0	0	0	0

Jumlah pendapatan denda Retribusi Penggantian cetak KTP, KK dan Akta Capil tahun 2019 daerah sebesar Rp 0,- merupakan realisasi denda retribusi cetak KK, KTP, dan Akta Capil dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, sbb.

No	Denda Keterlambatan	Jumlah
1.	AKTA, KK & KTP	0
Jumlah		0

Hal ini sesuai dengan Perwali No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta No 11 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dimana dalam Pasal 94 dan Pasal 95 menyebutkan bahwa Setiap Penduduk yang melampaui batas pelaporan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
2.BELANJA	13.924.458.108	13.416.438.029	508.020.079	13.686.417.296

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi :

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Belanja Operasi	12.928.170.858	12.479.039.629	449.131.229	12.693.413.540

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Pegawai	5.441.294.738	5.193.501.868	247.792.870	4.716.759.872

Merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
2) Belanja Barang dan Jasa	7.486.876.120	7.285.537.761	201.338.359	7.976.653.668

Merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat disajikan dalam tabel IV.A.2.a.2) berikut :

Tabel : IV.A.2.a.2)

Jumlah Belanja Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencapil Th 2019

No	Kegiatan	ANGGARAN TH 2019	REALISASI TH 2019	KURANG / LEBIH	REALISASI TH 2018
1	3	4	5	6	7
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.500.000	5.375.300	124.700	5.195.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.850.000	1.944.200	1.905.800	2.844.200
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.400.000	4.400.000	0	3.900.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	89.530.000	88.851.200	678.800	104.914.035
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.837.000	23.785.000	52.000	23.800.000
6	Penyud. alat tulis kantor	25.000.000	24.922.100	77.900	29.800.000
7	Penyud. barang cetakan dan penggandaan	1.284.958.470	1.231.985.300	52.973.170	3.069.295.600
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.500.000	5.485.000	15.000	5.000.000
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	112.666.250	110.142.000	2.524.250	101.455.300
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.850.000	3.850.000	0	3.455.000
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	5.950.000	5.872.000	78.000	4.396.000

	perundang-undangan				
12	Penyediaan makanan dan minuman	36.200.790	36.200.750	40	33.840.000
13	Rapat-rapat koord. dan Konsl. ke Luar daerah	160.000.000	159.988.855	11.145	279.637.358
14	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	1.572.568.000	1.556.417.700	16.150.300	181.637.000
15	Pengadaan mebeleur	44.831.250	42.352.300	2.478.950	232.074.556
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	107.442.250	105.160.700	2.281.550	151.888.500
17	Pemlh. rutin/ berkala kend. dinas / operasional	176.500.000	160.036.250	16.463.750	180.192.250
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlkp. Gd. kantor	25.000.000	24.997.500	2.500	34.769.500
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.500.000	5.400.000	100.000	5.500.000
20	Pemb. dan pengoperasian SIAK scr. terpadu	444.160.800	442.064.476	2.096.324	751.573.740
21	Implementasi sistem adm Kependd. (membangun, updating & pemeliharaan)	1.696.143.600	1.608.833.060	87.310.540	1.336.881.766
22	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	58.000.000	57.763.300	236.700	152.425.120
23	Penyid. informasi yang dapat di akses masy.	71.600.000	70.690.700	909.300	166.777.923
24	Peningkt. pelynn.				

	publik dalam bid.kependudukan	757.229.000	750.358.000	6.871.000	1.250.064.793
25	Pengembangan data base kependudukan	25.650.000	25.608.200	41.800	218.090.069
26	Sosialisasi kebijakan kependudukan	117.805.960	115.383.300	2.422.660	281.675.7322
27	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	206.305.000	203.785.200	2.519.800	356.007.462
28	Penyusunan Kebijakan Kependudukan (DAK)	1.353.785.000	1.293.949.170	59.835.830	1.346.422.420
29	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	13.050.000	11.725.000	1.325.000	17.754.000
30	Penetapan RKPD	5.500.000	5.437.500	62.500	19.665.000
31	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	40.850.000	40.172.100	677.900	74.325.900
	Jumlah	8.483.163.370	8.222.936.161	260.227.209	13.686.417.296

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
b. Belanja Modal	996.287.250	937.398.400	58.888.850	993.003.756

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yang terdiri dari:

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Mo dal Peralatan dan Mesin	996.287.250	937.398.400	58.888.850	993.003.756
2) Belanja Mo dal				

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
3) Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0	0	0	1.393.000

1. Belanja Modal dan Peralatan Mesin

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Barang	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	Transportable ElectricGenerating Set	Honda / Excell SF 7000 DXS	1	61.225.000	61.225.000
2	Air Conditioning Unit	Midea / 1,5 PK	1	4.950.000	4.950.000
3	Mesin Absensi	Fingerspot / Revo 156BNC	2	4.950.000	9.900.000
4	LCD Projector	Epson / EB- 2245U	1	34.650.000	34.650.000
5	Meja Rapat	-	6	5.000.000	30.000.000
6	Alat Dapur Lainnya	-	2	107.000	214.000
7	Alat Dapur Lainnya	Potobelo	1	345.000	345.000
8	Dispenser	Delvonta	2	488.000	976.000
9	Alat Prasmanan	Supra / -	1	805.000	805.000
10	Alat Prasmanan	- / square	3	235.000	705.000
11	Alat Prasmanan	Supra / -	1	805.000	805.000
12	PC Unit/ Komputer PC	Dell / Inspiron 3280	1	10.450.000	10.450.000
13	Lap Top	Lenovo / Yoga 520-14IKB i5- VGA	1	12.154.134	12.154.134
14	Lap Top	Asus / FX505- DD-R5581T	1	23.950.148	23.950.148
15	Note Book	Samsung / Galaxy Tab S4	4	21.250.000	85.000.000
16	Note Book	Dell / Inspiron 3480	3	3.950.000	38.748.000
17	Printer	Epson / M200	1	2.807.000	2.807.000
18	Printer	Evolis / Primacy	5	24.947.045	124.734.225

		SP00308 Simplex Printer			
19	Printer	Epson / LQ 2190	5	9.116.930	45.584.650
20	Printer	Fargo / HDP 5000 (75201)	2	115.312.500	230.625.000
21	Printer	Epson / FX 2190 Dotmatrik2	1	16.712.000	16.712.000
22	Server	Lenovo / SR550	1	177.616.000	177.616.000
23	CCTV -DVR	Hikvision / 16 channel	1	6.132.011	6.132.011
24	Wheel Chair	Galena / manual	2	4.890.000	9.780.000
25	CCTV	Hikvision / Indoor 2 MP	8	1.066.133	8.529.064
Jumlah				543.913.901	937.398.400

2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama Barang	Merek / Judul	Jumlah Barang	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	-	-	0	0	0
	Jumlah		0	0	0

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

A.2 LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN – LO Rp. 0,-

Jumlah pendapatan daerah LO sebesar Rp 0,- merupakan

realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

**a. Lain-lain PAD Yang Sah Rp 0,-
– LO**

Merupakan realisasi atas pendapatan asli daerah - LO dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan asli daerah LO terdiri dari :

No	Denda Keterlambatan	Jumlah
1.	AKTA, KTP dan KK	0
Jumlah		0

2. BEBAN - LO

Uraian	2019	2018	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
BEBAN-LO	11.607.984.444,00	12.973.147.789,56	1.365.163.345,56	10,52

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi :

2.1 Belanja Operasi Rp 11.607.984.444,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

2.1.1 Beban Pegawai Rp 5.377.396.418,00

Merupakan realisasi beban pegawai – LO periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp 6.230.588.026,00

Merupakan realisasi beban barang dan jasa – LO periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

A.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A.3.1 Ekuitas Awal **Rp 3.416.924.146,68**

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2019.

A.3.2 Surplus/ Defisit – LO **(Rp. 11.607.984.444)**

Merupakan saldo surplus/ defisit - LO per 31 Desember 2019.

A.3.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :

1. Koreksi nilai persediaan : Rp 0
2. Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap : Rp. 0

A.3.4 Ekuitas Akhir **(Rp 5.225.377.731,68)**

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2019.

B. NERACA

B.1 ASET LANCAR

	Tahun 2019	Tahun 2019 (Rp)
1. Kas	0	0,00

Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

	Tahun 2019	Tahun 2018 (Rp)
a. Kas di Bendahara	0	0,00

Pengeluaran

Kas sebesar Rp 40.491.432,- Telah di setor ke Bank Jateng tgl 31 Desember 2019 sebagai Setoran Sisa UP 2019.

	Tahun 2019	Tahun 2018 (Rp)
b. Kas di Bendahara	0	0

Penerimaan

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
2. Persediaan	Rp 2.429.064.218,00	Rp 1.387.085.083,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018.

Adapun rincian persediaan adalah sebagai berikut :

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018(Rp)
a. Persediaan Alat	Rp 2.389.651.718,00	Rp 526.962.000,00

Tulis kantor

Merupakan saldo per 31 Desember 2019 persediaan Alat Tulis Kantor.

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
b. Persediaan Peralatan Kebersihan & bahan pembersih	Rp	38.836.500,00	Rp	19.644.000,00

Merupakan saldo per 31 Desember 2019.

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018(Rp)	
c. Persediaan Benda Pos	Rp	576.000,00	Rp	15.000,00

Merupakan saldo per 31 Desember 2018 persediaan Benda pos.

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
d.Persediaan Karcis dan Barang Cetakan	Rp	0	Rp	840.464.083,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan karcis dan barang cetakan lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018. Yang terdiri dari:

Persediaan Usang	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
	Rp	28.417.175,00	Rp	17.079.050,00

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
B.3 ASET TETAP	Rp	3.000.464.111,00	Rp	2.769.293.349,24

Merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018.

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
1. Peralatan dan Mesin	Rp	8.664.182.077,61	Rp	7.673.452.777,61

Merupakan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018. Penambahan dan pengurangan atas peralatan dan mesin dirinci sebagai

berikut : (Penambahan dan pengurangan disertai dengan penjelasan atas sebab terjadinya).

1)	Penambahan :		
	a. Belanja modal	Rp	937.398.400,00
	a. Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	0,00
	b. Reklasifikasi dari jenis Aset yang Lain	Rp	59.532.000,00
	c. Mutasi antar SKPD	Rp	0,00
	d. Hibah dari BPKMS	Rp	0,00
	e. Hibah dari BOS	Rp	0,00
	f. Hibah dari CSR/Masyarakat	Rp	0,00
	Total Penambahan	Rp	996.930.400,00
2)	Pengurangan :		
	a. Penghapusan Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
	b. Reklasifikasi ke kelompok asset yang lain	Rp	000
	c. Ekstrakomptabel.	Rp	3.850.000,00
	d. Mutasi antar SKPD/Unit Kerja dan pengurangan lainnya.	Rp	0,00
	e. Penyusutan	Rp	0,00
	Total Pengurangan	Rp	3.850.000,00
	Total Kenaikan Tahun 2019 (Penambahan – Pengurangan)	Rp	1.000.780.400

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
2. Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 0

Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- .

No	Uraian	Nilai (Rp)
1)	Penambahan :	
	a. Belanja Modal Tahun 2018	0
	b. Kapitalisasi Barang & Jasa	0
	c. Reklasifikasi dari jenis asset lainnya	0
	d. Mutasi antar SKPD	0

	e. BPKMS	0
	f. BOS	0
	g. CSR/Masyarakat	0
	h. Dll	
	Jumlah penambahan	-
2)	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	0
	b. Barang Ekstrakompatabel	0
	c. Mutasi Antar SKPD	0
	Jumlah pengurangan	-
	Jumlah kenaikan	0

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
3. Akumulasi Penyusutan	0	(-)

Merupakan nilai total penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

B.4. Kewajiban

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	0,00	Rp	0,00

Merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

	Tahun 2019 (Rp)		Tahun 2018 (Rp)	
a. Utang Beban	Rp	184.512.198,00	Rp	496.648,00

Pada th 2019 ada Utang Beban Rp. 184.512.198,- merupakan Pembayaran Telepon bln. Desember 2019 Rp. 157.850,- Pembayaran Internet bln. Desember th. 2019 sebesar Rp. 459.798,- Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi PNS Rp 178.394.550,- Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Rp 5.500.000,- Sampai dengan 31 Desember 2019.

B.5 EKUITAS

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Ekuitas	Rp 5.225.377.731,68	Rp 3.416.924.146,68

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018.

BAB V

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.

Surakarta, 31 Desember 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SURAKARTA**

YUHANES PRAMONO, SH, MSi

NIP. 19640413 198903 1 010

**D. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG
BELUM DIGAMBARKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN
KEUANGAN.**